



Ali ibn Abi Talib: The Caliphate Conflicts of Ali ibn Abi Talib and Their Relevance to Modern Islamic Politics

Asri Yanti Siregar¹, Amril M²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

E-mail: 2239012531@students.uin-suska.ac.id¹, amrilm@uin-suska.ac.id²

ABSTRACT

This article discusses the leadership of Ali ibn Abi Talib as the fourth caliph in Islamic history, a period marked by political turmoil and internal conflict following the death of Uthman ibn Affan. This crisis was highlighted by major events such as the Battle of the Camel, the Battle of Siffin, and the emergence of the Kharijites. Using a descriptive-qualitative approach based on literature review, this study examines how Ali applied principles of justice, equality, and moral responsibility in responding to these challenges. The findings show that despite the brevity and trials of his rule, Ali remains a model of integrity and steadfast leadership, offering valuable lessons in governing during times of crisis.

Keywords: Ali ibn Abi Talib, Islamic Leadership, Battle of the Camel, Battle of Siffin, Political Crisis.

PENDAHULUAN

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat dalam sejarah Islam yang naik ke tampuk kekuasaan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ia memimpin di tengah situasi yang penuh gejolak, di mana umat Islam masih belum pulih dari krisis kepemimpinan. Kondisi sosial-politik saat itu sangat rapuh, ditandai dengan berbagai ketegangan internal yang menguji stabilitas umat. Ali harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan berbeda terhadap arah masa depan kepemimpinan Islam.

Salah satu konflik besar yang terjadi pada masa pemerintahan Ali adalah Perang Jamal. Pemberontakan ini dipimpin oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, dua sahabat Nabi yang sangat dihormati, bersama Aisyah, istri Nabi Muhammad. Mereka menuntut agar Ali segera mengadili para pembunuh Utsman bin Affan. Meskipun sebelumnya telah berbaiat kepada Ali, perbedaan pendapat mengenai keadilan dan mekanisme pelaksanaannya membuat mereka mengambil jalan konfrontatif dan akhirnya berujung pada peperangan.

Perang Jamal menggambarkan betapa rentannya kesatuan umat Islam saat itu. Ali sebenarnya berusaha menghindari pertumpahan darah dan mencari penyelesaian damai. Namun, karena situasi yang semakin memanas dan dukungan militer dari kedua belah pihak, perang pun tidak terhindarkan. Konflik ini berakhir dengan kemenangan di pihak Ali, tetapi meninggalkan luka sejarah yang dalam karena mempertemukan sesama sahabat Nabi dalam pertempuran yang merenggut banyak nyawa.

Selain Perang Jamal, Ali juga menghadapi konflik besar lainnya yaitu Perang Shiffin. Kali ini lawannya adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam yang juga menolak mengakui kekhalifahan Ali sebelum pelaku pembunuhan Utsman diadili. Ketegangan ini akhirnya memuncak menjadi perang terbuka yang melibatkan dua kekuatan besar umat Islam. Meskipun pertempuran berlangsung sengit, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau tahkim, yang kemudian menjadi sumber persoalan baru.

Keputusan Ali untuk menerima tahkim ditentang keras oleh sebagian pendukungnya, terutama mereka yang kemudian membentuk kelompok Khawarij. Mereka menganggap bahwa penerimaan tahkim adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam dan melemahkan posisi Ali sebagai khalifah. Khawarij lalu berubah menjadi kelompok radikal yang tidak hanya menarik dukungan, tetapi juga melakukan pemberontakan dan kekerasan terhadap pemerintahan Ali serta umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka.

Rangkaian konflik yang dihadapi oleh Ali menunjukkan betapa kompleks dan sensitifnya dinamika politik Islam pada masa awal. Persoalan legitimasi kekuasaan tidak berdiri sendiri, tetapi bercampur dengan ambisi pribadi, perbedaan tafsir agama, serta kepentingan politik kelompok tertentu. Di tengah situasi seperti ini, Ali tetap berpegang pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral sebagai dasar kepemimpinannya, meskipun pilihan-pilihannya seringkali tidak populer.

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam ketiga pemberontakan besar yang terjadi di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yakni Perang Jamal, Perang Shiffin, dan gerakan Khawarij. Dengan pendekatan historis-politik, penulis juga berupaya melihat dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut terhadap perkembangan sistem politik Islam. Selain itu, pembahasan ini mencoba menggali relevansi nilai-nilai kepemimpinan Ali dalam menghadapi krisis, yang tetap menjadi cermin penting bagi umat Islam dalam memahami dinamika kepemimpinan di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku-buku sejarah Islam modern, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib serta dinamika konflik politik yang terjadi pada periode tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah hubungan sebab-akibat dari tiga konflik utama, yaitu Perang Jamal, kemunculan Khawarij, dan Perang Shiffin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika politik pada masa Ali dan meninjau relevansinya terhadap perkembangan politik Islam di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Biografi Ali Bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah, tepatnya di dalam Ka'bah yang terletak di masjidil haram, pada hari Jum'at 13 Rajab sekitar tahun 600 M. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya, namun jika dikatakan bahwa ia lahir 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka hal itu merujuk pada sumber sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi lahir pada tahun 570 M. Nama lengkapnya adalah 'Ali bin Abi Thalib (Abd Manaf) bin Abdul Muththalib (Syaibah) bin Hasyim ('Amr) bin Abd Manaf (al-Mughirah) bin Qushay (Zayd) bin Kilab bin Murrâh bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan.

Ali merupakan putra dari Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abd Manaf bin

Qushay. Menurut riwayat, Fatimah adalah perempuan pertama dari Bani Hasyim yang melahirkan seorang putra bagi keluarga tersebut. Dengan demikian, Ali adalah sosok pertama dari suku Quraisy yang lahir dari kedua orang tua yang berasal dari Bani Hasyim. Sebelumnya, keluarga Bani Hasyim umumnya menikah dengan keluarga di luar kalangan mereka. Ali memiliki tiga kakak laki-laki, yaitu Talib, Uqayl, dan Ja'far, serta dua saudara perempuan, yakni Ummu Hani dan Jumanah. Sebagai anak bungsu, jarak usia antara Ali dan setiap kakaknya sekitar 10 tahun. Semua saudara kandungnya berasal dari ibu yang sama, yaitu Fatimah binti Asad, yang telah memeluk Islam dan ikut berhijrah.

Sejak kecil, Ali dibesarkan dalam asuhan Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayanginya seperti anak sendiri. Karena kedekatan mereka, Nabi menikahnya dengan putrinya, Fatimah az-Zahra, yang kemudian melahirkan Hasan dan Husain. Ali juga dikenal dengan beberapa julukan, di antaranya Abu Turab dan Abu al-Qasim. Ia merupakan salah satu orang pertama yang menerima kenabian Muhammad setelah Khadijah dan Abu Bakar. Keteguhan dan keberaniannya dalam membela Nabi terlihat jelas saat ia rela menggantikan posisi tidur Nabi pada malam hijrah untuk melindunginya dari ancaman musuh. Hal ini menjadi bukti pengorbanan dan loyalitasnya terhadap Islam sejak awal dakwah Nabi Muhammad SAW.

B. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib Sebagai Khalifah

Pengangkatan Ali sebagai khalifah terjadi dalam situasi yang penuh gejolak setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Saat itu, umat Islam menghadapi kondisi yang tidak stabil dan mengalami perpecahan. Awalnya, Ali menolak jabatan tersebut, mengingat kekacauan politik yang sedang berlangsung. Namun, setelah mempertimbangkan kepentingan umat, ia akhirnya menerima amanah itu.

Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad melalui sanad yang sahih dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, disebutkan bahwa banyak orang mendatangi rumah Ali, mengetuk pintunya dengan keras, dan masuk sambil berkata, "*Utsman telah terbunuh, sementara umat Islam membutuhkan pemimpin. Kami tidak melihat ada orang yang lebih layak selain engkau, wahai Ali.*" Ali menjawab, "*Jangan berharap kepada saya, karena saya lebih senang menjadi penasihat daripada pemimpin.*" Namun, mereka bersikeras, "*Tidak, demi Allah, kami tidak melihat ada orang yang lebih berhak menjadi khalifah selain engkau.*" Ali pun menegaskan bahwa baiat harus dilakukan secara terbuka, bukan secara diam-diam. Ia kemudian pergi ke masjid, dan di sana, umat Islam secara terbuka membaiaitnya sebagai khalifah.

Meskipun mendapat dukungan dari mayoritas penduduk Madinah, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Beberapa tokoh, termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan, menolak keabsahan kepemimpinannya. Selain itu, situasi di Madinah masih kacau dengan sedikit tokoh senior yang tersisa di kota itu. Beberapa kelompok, terutama keluarga Mu'awiyah, juga menentang Ali. Desakan dari para sahabat dan kaum Muslimin semakin kuat, hingga akhirnya Ali menerima baiat sebagai khalifah pada tahun 656 M (35 H) di Masjid Nabawi. Baiat ini dilakukan secara terbuka oleh kaum Muhajirin dan Anshar, meskipun ada beberapa tokoh penting yang masih ragu dan enggan memberikan dukungan penuh. Sejumlah sahabat terkemuka, seperti Thalhah, Zubair, dan Aisyah, menolak kepemimpinannya karena berpendapat bahwa Ali seharusnya lebih dahulu menghukum para pembunuh Utsman sebelum menerima baiat.

Selain itu, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman, menuntut agar Ali segera menindak para pemberontak sebagai syarat untuk mengakui

kekhalfahannya. Situasi ini membuat Ali harus menghadapi perlawanan dari berbagai pihak sejak awal pemerintahannya. Meski demikian, ia tetap menjalankan pemerintahan dan tercatat sebagai khalifah keempat dalam sejarah Islam. Setelah dibaiat sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menata kembali pemerintahan. Ia mengganti pejabat-pejabat yang diangkat oleh Utsman, termasuk para gubernur, serta menunjuk penggantinya. Selain itu, Ali menarik kembali tanah dan hibah yang sebelumnya diberikan Utsman kepada kerabatnya tanpa alasan yang sah. Ia juga menerapkan kebijakan distribusi tunjangan dari Baitulmal secara merata, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, tanpa membedakan antara sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dan yang datang belakangan. Demi efektivitas pemerintahan, Ali memindahkan pusat pemerintahannya dari Madinah ke Kufah.

Selama masa kepemimpinannya, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, berpikir visioner, serta cerdas dalam mengambil keputusan. Selain itu, Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Allah, sering menangis karena takut kepada-Nya, serta selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakannya. Kesederhanaannya tercermin dalam gaya hidupnya, baik dalam berpakaian maupun dalam memilih makanan, serta sikapnya yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain.

Namun, berbagai tantangan segera muncul, terutama terkait tuntutan untuk menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Thalhah, Zubair, dan Aisyah mendesak Ali agar segera menindak para pelaku, tetapi kompleksitas situasi membuat hal itu sulit dilakukan, mengingat pembunuhan Utsman melibatkan banyak pihak dari berbagai wilayah. Di sisi lain, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah, juga menolak kepemimpinan Ali dan menggunakan isu pembunuhan Utsman untuk meragukan legitimasi. Ketegangan politik pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib semakin diperparah oleh kegagalannya mengungkap dalang di balik pembunuhan Utsman bin Affan, yang merupakan kerabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Kecewa terhadap ketidakjelasan penyelesaian kasus ini memicu perselisihan antara keduanya, yang pada akhirnya berujung pada Perang Shiffin. Selain itu, konflik internal di dalam umat Islam semakin memanas dengan munculnya Perang Jamal. Thalhah, Zubair, dan Aisyah menuntut keadilan atas kematian Utsman dan memimpin perlawanan terhadap Ali. Dalam pertempuran ini, Aisyah ikut serta dengan menunggang unta, sehingga perang ini dikenal sebagai Perang Unta.

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan dan keteguhan hati, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Islam yang penuh dinamika. Warisan kepemimpinannya tetap menjadi inspirasi, terutama dalam hal keadilan, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi ujian kepemimpinan. Namun, konflik yang terjadi di masanya meninggalkan dampak jangka panjang yang turut berkontribusi pada munculnya berbagai perpecahan dalam dunia Islam.

C. Konflik Ali bin Abi Thalib dengan Thalhah, Zubair dan Aisyah (Perang Jamal/Unta)

Mahmoud M. Ayoub menyebut konflik Thalhah dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib sebagai kasus yang unik, karena mereka awalnya membaiat Ali sebagai khalifah tetapi kemudian justru menentangnya. Menurut Ya'qubi, mereka mengeluh kepada Ali karena kondisi finansial mereka memburuk setelah wafatnya Nabi. Mereka meminta kedudukan yang lebih tinggi serta bagian yang lebih besar dari Baitulmal. Ali sempat mengangkat Thalhah sebagai Gubernur Yaman dan Zubair sebagai Gubernur Yamamah

serta Bahrain, tetapi mereka menolak dan meminta bagian lebih besar dari Baitulmal. Merasa kecewa, Ali mencabut jabatan mereka, yang akhirnya menimbulkan kebencian dan membuat mereka mencari dukungan untuk melawan Ali. Untuk memperkuat posisi mereka, Thalhah dan Zubair pergi ke Makkah dan berhasil meyakinkan Aisyah untuk bergabung dengan dalih menuntut keadilan atas kematian Utsman bin Affan. Mu'awiyah juga memanfaatkan situasi ini dengan menghasut mereka agar memberontak, menjanjikan dukungan dari masyarakat Suriah, serta mendorong mereka merebut Kufah dan Basrah sebelum Ali tiba.

Konflik ini mencapai puncaknya dalam Perang Jamal di Basrah pada 6 Desember 656 M. Dalam pertempuran itu, Zubair menegaskan bahwa Ali tidak lebih berhak atas jabatan khalifah dibanding dirinya, Thalhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, meski berhasil menggalang dukungan, mereka akhirnya dikalahkan oleh pasukan Ali. Thalhah terbunuh oleh panah yang dilepaskan Marwan bin Al-Hakam, sementara Zubair yang mundur dari pertempuran diburu dan dibunuh oleh seorang anggota suku Tamim atas perintah al-Ahnaf bin Qais, seorang pendukung setia Ali. Dengan ini, pasukan Ali meraih kemenangan dan menegaskan posisinya sebagai khalifah yang sah.

D. Perlawanan Mu'awiyah bin Abi Sufyan terhadap Ali bin Abi Thalib (Perang Siffin dan Tahkim)

Tekanan yang diberikan Mu'awiyah terhadap Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Ali selama masa kepemimpinannya. Mu'awiyah mengklaim bahwa tindakannya didasarkan pada keinginan untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan, di mana ia menganggap dirinya sebagai wali atau ahli waris sah dari khalifah yang terbunuh. Selain itu, ia juga mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah dengan dukungan penuh dari rakyat Suriah setelah Ali resmi menjabat sebagai khalifah. Dalam upaya mencapai ambisinya untuk berkuasa, Mu'awiyah menerapkan strategi politik yang pragmatis.

Salah satunya adalah mengusulkan agar Ali menyerahkan wilayah Suriah dan Mesir kepadanya, sementara Ali tetap menguasai Irak dan Hijaz. Tawaran ini disampaikan melalui Jarir, utusan Ali yang dikirim untuk mencari dukungan rakyat Suriah, namun upaya ini tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Konflik antara Mu'awiyah dan Ali dipicu oleh dua faktor utama, *pertama*, penyelidikan terhadap pelaku pembunuhan Utsman serta persaingan dalam kepemimpinan. *Kedua*, hal ini menjadi alasan kuat bagi Mu'awiyah untuk terus memberikan tekanan terhadap Ali sebagai khalifah yang sah. Harun Nasution menjelaskan bahwa tuntutan utama Mu'awiyah adalah mengungkap dan mengeksekusi pembunuh Utsman, namun ia justru menuduh Ali terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya mencapai puncaknya dalam perang siffin.

Dalam perangan siffin, pasukan Ali bin Abi Talib hampir meraih kemenangan. Menyadari posisi pasukannya yang semakin terdesak, 'Amr bin 'Ash dari pihak Mu'awiyah mengusulkan agar diadakan perundingan. Awalnya, Ali bin Abi Talib meragukan ketulusan usulan tersebut, namun karena tekanan dari sebagian pasukannya, ia akhirnya menyetujui seruan damai itu. Keputusan untuk melakukan Tahkim dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain upaya mencari solusi damai antara Ali dan Mu'awiyah, banyaknya korban jiwa dalam peperangan yang dikhawatirkan akan melemahkan umat Islam, kejenuhan masyarakat terhadap konflik yang terus berlanjut, serta seruan dalam Al-Qur'an, Khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 59, Al-Qur'an menekankan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan mengembalikannya kepada

sumber hukum utama dalam Islam. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi perselisihan, umat Islam diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah sebagai solusi yang adil dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Tempat perundingan disepakati di Daumatul Jandal. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai *tahkim* (arbitrase) antara pihak Ali dan pihak Mu’awiyah. Masing-masing pihak mengirimkan *delegasi* (kelompok dalam perundingan), yang dalam beberapa riwayat disebutkan berjumlah 400 orang (riwayat lain menyebutkan 100 orang). Delegasi dari pihak Ali dipimpin oleh Abu Musa al-Asy’ari, sementara delegasi dari pihak Mu’awiyah dipimpin oleh ‘Amr bin ‘Ash. Dalam perundingan tersebut, kedua belah pihak menyepakati bahwa demi meredam konflik, baik Ali bin Abi Talib maupun Mu’awiyah harus turun dari jabatannya. ‘Amr bin ‘Ash kemudian meminta agar Abu Musa al-Asy’ari menyampaikan hasil keputusan lebih dahulu dengan alasan penghormatan karena Abu Musa lebih tua dan lebih dahulu masuk Islam. Tanpa curiga, Abu Musa menerima permintaan itu dan menyampaikan hasil perundingan di hadapan seluruh delegasi. Ibnu Abbas sempat memperingatkan Abu Musa agar berhati-hati dan tidak berbicara sebelum ‘Amr bin ‘Ash menyampaikan pernyataannya. Namun, Abu Musa menolak nasihat tersebut. Dalam pidatonya, Abu Musa menyampaikan bahwa mereka berdua telah sepakat mencopot Ali dan Mu’awiyah dari jabatan, dan menyerahkan pemilihan khalifah kepada umat. Ia pun menyatakan secara terbuka bahwa dirinya mencopot Ali dari jabatan khalifah.

Setelah Abu Musa berbicara, giliran ‘Amr bin ‘Ash maju dan menyampaikan pidatonya. Ia menyatakan bahwa Abu Musa telah mencopot Ali, dan dirinya pun menyetujuinya. Namun, secara tiba-tiba ia menyatakan bahwa Mu’awiyah adalah khalifah yang sah sebagai penerus Utsman bin ‘Affan dan lebih berhak atas kekuasaan tersebut. Mendengar hal itu, Ibnu Abbas membentak Abu Musa al-Asy’ari, yang hanya menjawab bahwa dirinya telah tertipu oleh ‘Amr bin ‘Ash. Ia kemudian mencaci ‘Amr karena telah menipu dan berbuat licik. Dapat dibayangkan betapa kacau dan riuh suasana yang terjadi di Daumatul Jandal saat itu. Para pendukung Ali bin Abi Talib diliputi rasa kecewa dan terpukul. Sebaliknya, pihak Mu’awiyah merayakan hasil perundingan dengan penuh kegembiraan. Selesai peristiwa yang menggemparkan tersebut, Abu Musa al-Asy’ari segera meninggalkan Daumatul Jandal menuju Makkah. Sementara itu, ‘Amr bin ‘Ash bersama rombongan utusannya kembali untuk menemui Mu’awiyah, menyampaikan hasil arbitrase, serta menyampaikan ucapan selamat atas pengakuan Mu’awiyah sebagai khalifah. Peristiwa inilah yang kemudian menandai awal dari kekuasaan Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di sisi lain, Ibnu Abbas langsung menghadap Ali bin Abi Talib untuk menyampaikan hasil dari proses *tahkim* tersebut.

E. Tantangan dari Khawarij terhadap Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib

Peristiwa *Tahkim* antara Ali dan Mu’awiyah menjadi pemicu munculnya berbagai aliran Islam yang memiliki dimensi politik, salah satunya adalah Khawarij. Awalnya, mereka merupakan pendukung Ali, tetapi kemudian menolak keputusannya dalam

menerima Tahkim sebagai jalan keluar dalam sengketa dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Kaum Khawarij pertama kali muncul di Irak selatan pada abad ke-7 sebagai bentuk protes terhadap keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menerima perundingan (tahkim) setelah Perang Shiffin pada tahun 37 H/684 M. Ketidakpuasan mereka memuncak ketika Amr bin Al-As mengangkat Al-Qur'an di atas tombak sebagai simbol perdamaian, yang akhirnya membuat Ali menerima perundingan. Namun, ketika Ali menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai wakilnya, mereka justru mengusulkan Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding. Akibat peristiwa ini, sebanyak 12.000 pasukan memilih meninggalkan Ali dan kembali ke Kufah, sementara sebagian lainnya tetap setia karena meyakini bahwa keputusan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an. Perpecahan ini tidak hanya mencerminkan ketegangan politik, tetapi juga menunjukkan seberapa kuatnya keyakinan masing-masing kelompok terhadap prinsip yang mereka anut. Kaum Khawarij kemudian membentuk markas di Harura dan mengecam Ali sebagai pelaku kesyirikan karena menerima perantaraan manusia dalam penentuan hukum, bukan langsung kepada ketetapan Allah. Ketegangan semakin meningkat ketika dalam khutbah Jumat, kaum Khawarij meneriakkan teriakan "*tidak ada hukum selain milik Allah.*" Ali menegaskan bahwa selama mereka tidak memulai peperangan, tidak akan ada tindakan terhadap mereka. Untuk meredakan ketegangan, Ibnu Abbas dikirim sebagai juru runding guna menjelaskan keputusan Ali. Sebagian dari mereka akhirnya kembali bergabung, tetapi sebagian lainnya tetap bersikeras menentang dan semakin agresif, hingga pertempuran tak terhindarkan di Harura dan Nahrawan, dengan Abdullah bin Wahb Al-Rasyidi sebagai pemimpin mereka. Kaum Khawarij melakukan berbagai kekacauan.

Kelompok Khawarij merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Talib, Mu'awiyah bin Abi Sufyān, dan 'Amr bin 'Ash, karena mereka menganggap ketiga tokoh tersebut kafir akibat dianggap mencampuradukkan yang haq dengan yang batil. Rencana pembunuhan ini disusun dengan rinci, di mana Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Talib di Kufah, Hajjaj bin Abdullah untuk Mu'awiyah di Damaskus, dan 'Amr bin Bakar untuk 'Amr bin 'Ash di Mesir. Namun, hanya Ali bin Abi Talib yang berhasil dibunuh. Mu'awiyah hanya terluka, sedangkan 'Amr bin 'Ash selamat karena tidak pergi ke masjid, dan yang dibunuh adalah seorang kaum khawarij yang rupanya mirip dengan dirinya. Kaum Khawarij menilai Ali bin Abi Thalib harus disingkirkan karena tiga alasan utama:

1. Ali dianggap mengangkat diri sebagai khalifah dan mengkhianati umat dengan berdamai dengan Muawiyah
2. Ali dianggap syirik karena menyerahkan keputusan kepada manusia, bukan kepada hukum Allah
3. Ali dituduh berdosa karena memerangi pasukan Aisyah dalam Perang Jamal, meski tetap menghormatinya sebagai Ummul Mu'minin.

F. Relevansi Konflik Masa Ali bin Abi Thalib terhadap Politik Islam Modern

Konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki relevansi signifikan terhadap politik Islam modern. Pada masa tersebut, umat Islam menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial yang menguji kesatuan dan stabilitas komunitas Muslim. Beberapa konflik utama, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Relevansi konflik-konflik tersebut terhadap politik Islam modern dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Pentingnya Kepemimpinan yang Adil dan Transparan

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam mengelola pemerintahan. Tantangan besar yang dihadapinya, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, menunjukkan bahwa kekuatan politik saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas umat. Seorang pemimpin harus mampu bertindak adil, terbuka, dan mengutamakan persatuan.

Contoh nyata di Indonesia adalah isu tentang netralitas aparatur negara menjelang Pemilu 2024 menjadi sorotan besar masyarakat. Muncul berbagai laporan mengenai indikasi ketidaknetralan pejabat atau aparat yang terlihat memihak calon tertentu. Masyarakat semakin sadar bahwa pemimpin dan aparatur negara semestinya bersikap adil dan transparan demi menjaga demokrasi yang sehat. Kasus ini menggambarkan bagaimana keadilan dan keterbukaan nilai-nilai yang dijunjung tinggi Ali bin Abi Thalib masih sangat relevan. Tanpa transparansi dan keadilan, kepercayaan rakyat akan luntur dan perpecahan akan tumbuh, sebagaimana terjadi pada masa awal sejarah Islam.

2. Penyelesaian Konflik melalui Dialog dan Arbitrase

Upaya Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan perselisihan melalui tahkim (arbitrase) menunjukkan pentingnya dialog dan negosiasi dalam mengatasi perbedaan. Tahkim merupakan mekanisme penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai melalui arbitrase. Dalam proses ini, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk wakil atau juru bicara yang kompeten guna memutuskan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menjelang Pemilu 2024, suhu politik Indonesia memanas, terutama akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden, dengan memberikan pengecualian bagi kepala daerah. Keputusan ini menuai kritik karena dianggap sarat kepentingan politik dan mengguncang kepercayaan publik terhadap independensi lembaga negara. Di tengah ketegangan, sejumlah tokoh dan pemimpin politik memilih jalur dialog melalui diskusi publik dan pertemuan lintas partai. Meski belum sepenuhnya meredakan konflik politik yang lebih dalam, langkah ini menjadi angin sejuk yang menegaskan pentingnya stabilitas dan persatuan dalam kehidupan politik bangsa. Apa yang mereka lakukan ini sejalan dengan sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib di masa lalu. Saat menghadapi konflik yang bisa memecah belah umat, beliau tidak langsung memilih jalan kekerasan, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan perundingan (tahkim). Cara ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan politik, terutama di negara yang beragam seperti Indonesia, dialog dan keterbukaan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan mencegah perpecahan.

3. Dampak Perpecahan Internal terhadap Stabilitas Umat

Konflik internal pada masa Ali bin Abi Thalib, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, menyebabkan perpecahan yang berdampak pada stabilitas politik dan sosial umat Islam. Peristiwa ini melemahkan kekuatan umat dan membuka peluang bagi ancaman eksternal. Dalam politik Islam modern, perpecahan internal tetap menjadi ancaman yang dapat menghambat kemajuan umat.

Contoh nyata di Indonesia dari dampak perpecahan internal terhadap stabilitas umat, Pasca Pemilu 2024, media sosial dan ruang-ruang publik dipenuhi oleh perpecahan. Antar pendukung calon presiden saling serang, saling klaim kebenaran, bahkan sampai membawa-bawa agama dalam narasi kebencian. Sayangnya,

dampaknya tidak hanya berhenti di dunia maya, perpecahan ini merembet ke kehidupan sehari-hari: di masjid, majelis taklim, bahkan di keluarga, silaturahmi mulai renggang hanya karena beda pilihan politik. Perbedaan pandangan adalah hal wajar, tapi jangan sampai merusak tali persaudaraan. Umat islam perlu belajar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang lebih memilih dialog dan persatuan di tengah konflik. Jika umat mampu menjaga ukhuwah dan mengalihkan energi dari perpecahan menuju kebaikan bersama, maka mereka bisa menjadi kekuatan yang membawa berkah bagi bangsa dan umat manusia.

KESIMPULAN

Dinamika politik pada masa Ali bin Abi Thalib mengajarkan bahwa integritas dan keteguhan prinsip sangat penting dalam kepemimpinan, namun harus disertai dengan strategi yang tepat untuk menjaga persatuan umat. Konflik-konflik yang terjadi pada masa itu juga memperlihatkan pentingnya dialog, penyelesaian konflik secara adil, dan kehati-hatian dalam menghadapi perbedaan. Dalam konteks modern, pelajaran dari masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dapat menjadi cerminan bagi para pemimpin Muslim dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti konflik internal, fanatisme, dan perebutan kekuasaan. Prinsip keadilan, kesederhanaan, dan keberanian moral yang ditunjukkan oleh Ali tetap relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaini, "Mengurai Sejarah Timbulnya Pemikiran Ilmu Kalam dalam Islam," *ESOTERIK: Jurnal Akhlak dan Tasawuf* 1, no. 1 (Januari–Juni 2015)
- Bangkit Nugraha, Ariska Sara, Naila Nur Hikmah, Samsul Ma'arif, Izmi Nurul Azizah, Muhamad Parhan, dan Nisrina Fitri Ghaida, "Eksplorasi Sekte Khawarij dan Impresinya Terhadap Ajaran Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (April 2024)
- Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, Rifka Safira, dan Rahmiati, "Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Penerapan Tahkim dalam Penyelesaian Konflik: Analisis Kasus Pertempuran Siffin dengan Pendekatan Hukum Empiris dan Perspektif Islam," *Marwah Hukum* 2, no. 2 (2024)
- Elvi Wijayanti dan Nova Arya, "Tantangan Aisyah dan Zubair terhadap Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib," *Al-Hasib: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 3, (2025)
- Ikhrom Norvaizi, Siti Imroatul Latifah, dan Desi Ariyani, "Sejarah Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib: Analisis Peranannya dalam Perkembangan Peradaban Islam," *Tsaqofah & Tarikh* 9, no. 1 (Juni 2024)
- Junaidin, "Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan Permulaan Konflik Umat Islam: Peristiwa Tahkim," *Fi Tua: Jurnal Studi Islam*, vol. 1, no. 1, Juni (2020)
- Meliantina, "Nilai Pendidikan dalam Pemikiran Ali Bin Abi Thalib," *PENDEKAR: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 2, no. 2 (April 2024)

- Miftahur Ridho, “Peristiwa Tahkim (Polemik Perselisihan Politik dan Implikasinya),” *Humanistika* 5, no. 1 (Januari 2019)
- Muallif, “Peristiwa Tahkim,” Universitas Islam An Nur Lampung, 16 November 2022.
- Muhammad Noor, Muhammad Husni, dan Muhammad Iqbal, “Structuration in the Leadership of Caliph Ali bin Talib: Strukturasi dalam Kepemimpinan Khalifah Ali bin Thalib,” *Syams: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (Desember 2022)
- Muh. Rizal Hamdi, “Transformasi Sistem Pemilihan Khalifah Pasca Masa Khulafaur Rasyidun (Studi Terhadap Pengangkatan Yazid Bin Mu’awiyah Sebagai Khalifah Ke-2 Dinasti Umayyah),” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 1, no. 1 (Januari–Juni 2021)
- Nurul Abrar Md. Isa dan Ermy Azziaty Rozal, “Konflik Politik Semasa Pemerintahan ‘Ali Ibn Abi Talib,” *International Journal of West Asian Studies*, vol. 10, no. 6, (2018)
- Nur Hasanah Hasibuan, Afrizal, dan Sawaluddin, “Ali bin Abi Thalib: Kekhalifahan di Tengah Tiga Pemberontakan Besar,” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 6 (Desember 2024)
- Nurus Syarifah, “Kepentingan Politik Pemerintahan Mu’awiyah bin Abu Sufyan: Perpindahan Kekuasaan dari Kufah ke Damaskus,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021)
- Saidin Hamzah dan Hamriana, “Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib,” *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya* (2022)
- Sunandar dan Tomi, “Khulafa Rasyidin: Sistem Pemerintahan di Masa ‘Utsman bin Affan dan ‘Ali bin Abi Thalib,” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 2,no.1(2024)
- Surayah Rasyid, “Kontroversi Sekitar Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib,” *Jurnal Rihlah* 2, no. 1 (2015)